

Puluhan Konflik Pertambangan Terus Terjadi

Pacitan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada lebih dari 50 konflik tambang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim). Tak hanya menyebabkan konflik vertikal, sengketa pertambangan juga memicu konflik vertikal antara pekerja dan masyarakat sekitar daerah tambang.

"Sebagaimana yang terjadi disini (Pacitan,red). Dan peranan pemerintah tidak boleh mempertajam konflik itu. Justru harus menyelesaikan agar konflik tidak berlarut-larut," ujar Komisioner Sub Komisi Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM Johny Nelson Simanjuntak, Kamis (31/3).

Sengketa antara warga Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan sendiri sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Karena itu sejak Kamis (30/3) kemarin sejumlah anggota Komnas HAM turun ke lokasi pertambangan guna mengumpulkan data. Selain dari masyarakat, mereka juga menggali data dan keterangan dari Dinas Pertambangan Dan Energi, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pelayanan Perizinan, dan perusahaan penambang.

Menurut Johny, dari hasil survey yang dilakukan ada beberapa poin sebagai titik fokus perhatian penyelesaian sengketa. Diantaranya jaminan kepastian terhadap masyarakat bahwa kegiatan penambangan tidak merusak kehidupan mereka, baik langsung maupun tidak langsung, dan jaminan mengembangkan ekonomi rakyat maupun negara.

Jadi harus ada sumbangan dari tambang untuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun negara. "Juga memastikan bahwa tambang harus lepas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Karena pada umumnya didaerah-daerah pertambangan kan ada banyak praktik-praktik KKN dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu," ungkap dia.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, dari 50 lebih kasus sengketa pertambangan ada beberapa yang digolongkan besar. Diantaranya penolakan penambangan oleh warga di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Sulawesi Utara, Newmont, Freeport (Papua) dan Pacitan, Jatim.

Lebih lanjut Johny menjelaskan konflik tambang di Kota 1001 Goa ini dikategorikan besar karena unsur-unsur yang didapat dari lokasi diduga tidak hanya satu jenis bahan tambang. Dan ketika dibawa ke Cina, harganya disamaratakan, maka negara akan rugi.

Ia mencontohkan pada kasus Freeport. Kandungan emas yang melimpah baru diketahui setelah kontrak karya berjalan. "Kita dapat apa. Makanya saya ingin bicara lebih khusus lagi. Apa sebenarnya yang didapat kandungannya dari situ (penambangan di Pacitan,red). Kalau emas berapa persen, mangan berapa persen? Jangan pukul rata. Bahaya itu bos !," tandasnya.